

ANALISIS PERTUMBUHAN DAN PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN INDUK DI PROVINSI BENGKULU

Sunoto¹⁾, Bertha Iin Esti Indraswanti²⁾, Edy Rahmantlyo Tarsilohadi³⁾

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Indonesia

¹simbahnoto@yahoo.co.id, ²eindraswanti@yahoo.com, ³edyramantyo@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research was to analyze economic growth and shifting of economic structure of the origin district in Bengkulu Province. Base on BPS secondary time series data (2001-2017), descriptive analysis was used to analyze economic growth and shifting economic structure, specialty after the region otonomous era (OTDA). The DLQ and SSA method was used to determine the potential and leading sectors to increase economic performance. The result of this research was conclude that expansion of the the region in Bengkulu Provinsi has positif impact on economic development for the origin district. The ekonomis structure was shifting from premier sector to secondary and tertier sector. The potential and leading sector after OTDA become more than before (from 4 or 5 sector to 7 untul 9 sector).

Keywords : *Dynamic Location Quotient¹, Shift Share Analysis², Economic Growth³, Economic Structure⁴, Potential and Leading Sector⁵*

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu mekanisme penggunaan sumber daya yang terbatas dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam, teknologi, manusia, dan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang melalui mekanisme ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan baik swasta maupun publik agar memperoleh peningkatan taraf hidup dan kemiskinan. Untuk mempercepat proses tersebut, maka pemerintah melalui undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi ekonomi yang ada didaerahnya masing-masing. Dengan adanya Undang-undang tersebut, maka banyak daerah yang mengajukan pemekaran. Sedangkan sesuai dengan dalam PP 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang diatur juga meliputi penggabungan daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah. Dalam PP tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP 129/2000). Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa dimensi. Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil (Ida 2005).

Departemen Dalam Negeri (2005), khususnya Pusat Litbang Otonomi Daerah melakukan penelitian dengan judul Efektifitas Pemekaran Wilayah Di Era Otonomi Daerah. Penelitian di 9 daerah otonom baru (DOB) ini menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada satupun daerah DOB yang berada dalam kategori mampu meski penataan berbagai aspek pemerintahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan pedoman yang ada. Persoalan mendasarnya ialah karena DOB kurang mampu merumuskan dengan tepat kewenangan ataupun urusan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah serta kebutuhan masyarakat. Studi ini juga menyoroti pada sisi kelembagaan di mana kelembagaan yang terbentuk belum sepenuhnya disesuaikan dengan urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan daerah.

Beberapa masalah yang terkait dengan kelembagaan diantaranya yakni jumlah kelembagaan (SKPD) yang cenderung banyak, struktur organisasi yang cenderung besar, serta belum memperhitungkan kriteria efektivitas dan efisiensi kelembagaan yang baik. Pada aspek keuangan daerah, hanya satu dari sembilan daerah yang dikategorikan mampu dalam pengelolaan keuangannya. Problem utamanya yakni rendahnya kemampuan dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya PAD. Sedangkan pada aspek aparatur, hanya satu dari sembilan daerah yang dikategorikan sangat mampu dalam pengelolaan pemerintahannya. Hal ini dilihat ketersediaan, kualifikasi yang dimiliki, serta kesesuaian antara personil yang mengisi dan struktur yang tersedia. Umumnya DOB belum mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Pemekaran daerah sering dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan dan dekatnya akses pembangunan. Namun demikian, hasil dari pemekaran daerah membutuhkan evaluasi atas keberhasilannya. Ukuran keberhasilan yang paling banyak digunakan adalah pendekatan pembangunan ekonomi karena dianggap merupakan ukuran terdekat dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, studi evaluasi (Bappenas, 2007) menegaskan bahwa pemekaran membuka peluang untuk terjadinya *bureaucratic and political rentseeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pemekaran wilayah, baik dana dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Di sisi lain, sebagai sebuah daerah otonom baru (DOB), pemerintah daerah dituntut untuk menunjukkan kemampuannya menggali potensi daerah. Hal ini bermuara kepada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya menghasilkan suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Pemekaran juga dianggap sebagai bisnis kelompok elit di daerah yang menginginkan jabatan dan posisi. Eforia demokrasi juga mendukung. Partai politik, yang memang sedang tumbuh, menjadi kendaraan kelompok elit ini menyuarakan aspirasinya, termasuk untuk mendorong pemekaran daerah.

Provinsi Bengkulu sebelum keluarnya PP 129/2000 tentang pemekaran dan penggabungan, terdiri dari 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu, kemudian berkembang menjadi 9 Kabupaten dan 1 Kota. Menelaah pembangunan antar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu saat ini, kiranya perlu memperhatikan persoalan yang terjadi di daerah, yang mencakup berbagai perbedaan keadaan potensi ekonomi dan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Perekonomian suatu daerah selama kurun waktu pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan daerah lain, karena perekonomian suatu daerah bersifat sangat terbuka.

Dalam proses pencapaian pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sumber-sumber dana yang berupa modal pembangunan, dengan kemampuan antardaerah dalam menyediakan modal pembangunan tidak sama, akan menyebabkan pembangunan yang dicapai antardaerah terjadi ketimpangan. Kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah dalam era otonomi sekarang ini, mengharuskan pemerintah daerah dan masyarakatnya secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya

yang ada. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Dengan mencontoh mentah-mentah pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya, sehingga kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi baik itu masalah, kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Upaya pencapaian kemandirian daerah dan pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah dalam realitasnya dipengaruhi banyak faktor yang saling terjalin, berkaitan dan tumpang tindih sehingga sasaran pembangunan daerah seringkali tidak tercapai. Pada akhirnya akan ada daerah yang lebih maju dibanding dengan daerah lain bahkan berujung pada ketimpangan ekonomi antarpenduduk daerah yang berada di daerah yang lebih maju dibanding penduduk di daerah lainnya yang kurang maju.

Berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah telah diberikan wewenang penuh untuk menggali potensi-potensi ekonomi yang ada di daerahnya masing-masing. Percepatan desentralisasi dan otonomi daerah menghadapi kendala antara lain: masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional; masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri maupun sumber dana dari luar daerah; belum tersusunnya kelembagaan yang efektif; belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Kendala pembangunan yang terjadi di daerah tentu berpengaruh terhadap kinerja pembangunan yang nampak dari beberapa indikator penting, di antaranya pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. mengkaji pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi kabupaten induk di Provinsi Bengkulu.
2. mengkaji sektor unggulan kabupaten induk di Provinsi Bengkulu

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah dan Evaluasi Pemekaran

Prinsip otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, juga dengan pemerintah pusat (Badrudin, 2012: 41). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah (yang ditandai dengan pemekaran daerah) perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja pembangunannya. Landasan evaluasi pemekaran daerah didasarkan atas tujuan pemekaran daerah itu sendiri yang tertuang dalam PP 129/2000. Pemekaran daerah sendiri merupakan pemecahan daerah Provinsi, daerah kabupaten atau daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Dalam Bab II pasal 2 disebutkan tujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: (i) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (ii) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (iii) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (iv) percepatan pengelolaan potensi daerah; (v) peningkatan keamanan dan ketertiban; (vi) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Dua hal penting berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ialah: pertama, bagaimana pemerintah melakukannya, dan kedua, bagaimana dampaknya di masyarakat dan daerah itu sendiri setelah pemekaran tersebut berjalan selama lima tahun. Untuk pendekatan pertama maka aspek yang dikaji adalah sejauhmana 'input' yang dimiliki oleh pemerintah daerah pemekaran dapat digunakan semaksimal mungkin dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi 'output' akan difokuskan kepada aspek kepentingan utama masyarakat dalam mempertahankan hidupnya, yakni dari sisi ekonomi. Apabila kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi pada masa pemekaran semakin membaik maka secara tidak langsung berpengaruh kepada akses masyarakat terhadap pelayanan publik, baik pendidikan maupun kesehatan (Bappenas, 2007).

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi, juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran atau

upaya untuk menciptakan kesempatan kerja. Pembangunan merupakan proses perubahan yang terjadi di segala aspek kehidupan, namun aspek ekonomi tetap yang utama. Struktur ekonomi berubah seiring perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga kontribusi sektoral menjadi indikasi adanya transformasi struktural (Arsyad, 2016: 9). Pembangunan harus berorientasi pada keberpihakan pelaku ekonomi yang memiliki potensi dan bukan *rent seekers*, sehingga pembangunan daerah diarahkan pada penguatan ekonomi domestik. Penguatan ekonomi tersebut harus mencakup 4 unsur: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan (Sun'an dan Abdurrahman, 2015: 40). Oleh karena itu, penguatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari potensi yang dimiliki suatu daerah. Potensi yang besar menjadi kekuatan untuk peningkatan produktivitas (memungkinkan untuk surplus) yang dapat digunakan untuk mencapai pemerataan dan menjaga kesinambungan pembangunan.

Pembangunan ekonomi daerah juga mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan perusahaan-perusahaan baru, sehingga kebijakan pembangunan berdasar pada kekhasan daerah (*endogenous development*) yang memanfaatkan potensi SDM, kelembagaan dan sumber daya fisik (Rajab, dkk, 2011: 5). Dalam hal ini, pendekatan ekonomi regional dengan analisis sektor basis paling banyak digunakan untuk menentukan unggulan suatu daerah (Nurman, 2015:179). Kaitannya wilayah dengan pertumbuhan regional ialah suatu wilayah merupakan sumber ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan wilayah tersebut. Faktor yang menjadi patokan perkembangan regional terhadap suatu ruang atau wilayah yaitu: keuntungan lokasi, aglomerasi migrasi, dan arus lalu lintas ekonomi antar wilayah (Aditama, 2019).

Peningkatan pembangunan nasional dapat dilakukan dengan mengoptimalkan daya saing dan nilai sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah serta membangun ketersediaan infrastruktur penghubung guna kebutuhan distribusi logistik dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Pentingnya pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia sangat menentukan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan peluang ekonomi baru dengan mengembangkan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi regional, yang pada akhirnya akan ada pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Micariandy, 2019).

Analisis Economic Base

Analisis ini utamanya untuk menentukan sektor unggulan, biasanya menggunakan *Location Quotient* (LQ) dan *Shift share* (SS). LQ merupakan metode sederhana yang dapat dilakukan untuk mengetahui sektor potensial dari setiap wilayah. Cara kerja LQ adalah dengan menunjukkan perbandingan kontribusi setiap sektor pada suatu wilayah dengan kontribusi sektor tersebut dalam lingkup wilayah yang lebih besar, seperti halnya sektor pertanian di kabupaten dengan sektor pertanian yang ada di provinsi (Micariandy, 2019).

Shift share adalah suatu metode analisis yang berfungsi untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Analisis *Shift Share* memungkinkan pihak yang menganalisis dapat mengidentifikasi keunggulan daerahnya serta menganalisis industri ataupun sektor yang menjadi dasar perekonomian daerah. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *shift share* merupakan analisis untuk menganalisis peranan atau pergeseran suatu sektor di suatu daerah terhadap sektor nasional. Dengan mengetahui hasil analisa *shift share* mempermudah dalam menentukan sektor unggulan dalam suatu wilayah, dan mudah untuk mengambil keputusan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan kesejahteraan masyarakatpun dapat tercapai. Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya.

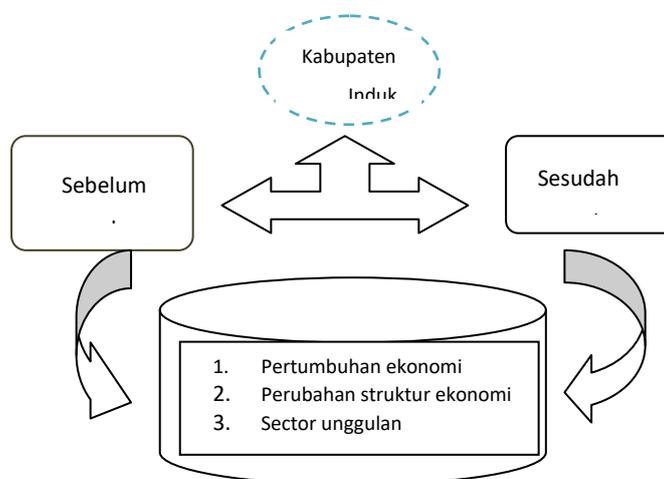
Penelitian Terdahulu

Dewi dan I Nyoman. (2017) meneliti menggunakan empat analisis, yaitu teknik analisis DLQ, MRP, dan Overlay dan analisis secara kualitatif di Kabupaten Karangasem Bali, menyimpulkan bahwa ada enam sektor basis, yaitu: sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Lainnya. Sektor potensial yang dapat dikembangkan adalah sektor transportasi dan pergudangan.

Nazipawati. (2015), yang meneliti sektor unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menggunakan analisis SLQ, DLQ, dan SSA menemukan bahwa sector Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan sector Jasa-jasa. Juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan mempengaruhi secara positif PDRB Kabupaten OKU pada rentang Tahun 2003-2005.

Gunanto. (2015). Dengan menggunakan perhitungan metode LQ di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, memperoleh hasil hanya terdapat satu sektor yang menjadi basis yaitu: sektor pertambangan dan penggalian. Tapi bila dirinci per sub sektor maka terdapat sub sektor yang merupakan basis ekonomi, yaitu: 1)Tanaman bahan makanan 2)Perikanan 3)Minyak dan gas bumi 4)Industri migas (mulai tahun 2002) 5)Angkutan laut 6)Angkutan sungai, danau dan penyeberangan (mulai dari tahun 2006).

Kerangka Penelitian



METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat diskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder runtut (*time series*) dari tahun 2001 sampai tahun 2017 yang diperoleh dari BPS. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, dan mencakup data PDRB harga konstan Tahun 2010 dan Pertumbuhan Ekonomi 4 Kabupaten Induk dan Provinsi Bengkulu.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik penentuan sector basis melalui analisis DLQ dan analisis *Shift Share*.

$$DLQ_{ij} = \left(\frac{(1+g_{ij}) / (1+g_j)}{(1+G_i) / (1+G)} \right)^t = \frac{IPPS_{ij}}{IPPS_i}$$

DLQ_{ij} = Indeks *Location Quotient*

g_{ij} = Nilai Tambah Brutto Sektor i di Kabupaten Induk

g_j = Nilai PDRB di Kabupaten Induk

G_i = Nilai Tambah Brutto Sektor i di Provinsi Bengkulu

G = Nilai PDRB di Provinsi Bengkulu.

t = Selisih tahun akhir dan tahun awal

$IPPS_{ij}$ = Indeks Potensi Perkembangan Sektor i di kabupaten Induk

$IPPS_i$ = Indeks Potensi Perkembangan Sektor i di Provinsi Bengkulu

apabila indek $LQ > 1$ berarti daerah tersebut mempunyai keunggulan komparatif dalam sektor i daripada Provinsi Bengkulu dan sektor i merupakan sektor basis. Jika indeks $LQ < 1$ berarti daerah tersebut tidak mempunyai keunggulan komparatif dalam sektor i, dan sektor i merupakan sektor non basis.

Sedangkan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi akan digunakan analisis *shift share* Klasik. Analisis *Shift Share* sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan dan kedudukan suatu sektor di daerah (Kabupaten Induk) dibandingkan dengan perkembangan sektor sejenis di tingkat yang lebih tinggi (Provinsi Bengkulu). Terdapat tiga komponen pertumbuhan yang dapat dihitung dengan menggunakan analisis SS ini, yaitu pengaruh pangsa (*share*), pengaruh bauran (*propotional shift*) dan pengaruh keunggulan (*differential shift*).

Formulasi SSA Model Klasik adalah:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Di mana:

D_{ij} = perubahan *output* sektor i di Kabupaten (j)

N_{ij} = pengaruh pertumbuhan provinsi sektor i di kabupaten (j)

M_{ij} = pengaruh bauran industri sektor i di kabupaten (j)

C_{ij} = pengaruh keunggulan kompetitif sektor i di kabupaten (j)

$$D_{ij} = E^*_{ij} - E_{ij}$$

$$N_{ij} = E_{ij} r_n$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

r_{in} , r_{ij} dan r_n , mewakili laju pertumbuhan sektor di Kabupaten (r_{ij}) Provinsi (r_{in}) dan total laju pertumbuhan Provinsi (r_n), yang diformulasikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = (E^*_{ij} - E_{ij})/E_{ij}$$

$$r_{in} = (E^*_{in} - E_{in})/E_{in}$$

$$r_n = (E^*_n - E_n)/E_n$$

Di mana:

E_{ij} : nilai tambah sektor i di Kabupaten (j)

E_{in} : nilai tambah sektor i pada tingkat Provinsi (n)

E_n : nilai tambah provinsi (n)

Semua dihitung dengan menggunakan tahun dasar, dan tanda (*) menunjukkan nilai tambah pada tahun akhir analisis.

Dengan menyederhanakan persamaan di atas, diperoleh:

$$D_{ij} = E_{ij}.r_n + E_{ij} (r_{in} - r_n) + E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Induk

Pemekaran daerah pada hakekatnya ingin mendekatkan akses pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa dengan pemekaran tidak boleh menurunkan kesejahteraan terutama untuk daerah induknya. Oleh karena itu evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah senantiasa diperlukan. Indikator pembangunan yang paling banyak disoroti adalah pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Bengkulu sebelum pemekaran (otonomi daerah) memiliki 1 kota dan 3 kabupaten (Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong), kemudian menjadi 1 kota dan 9 kabupaten. Dari 3 kabupaten induk ini, ternyata pada rentang tahun 2014 -2017 pertumbuhan ekonomi masih di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu (Tabel 1). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten induk masih menggungguli kabupaten pemekaran. Namun demikian, jika dilihat dari pertumbuhan

sektoralnya, tidaklah selalu lebih tinggi dari pertumbuhan sektoral Provinsi. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sector yang pertumbuhannya lebih rendah untuk semua kabupaten induk. Untuk Kabupaten Bengkulu Selatan, sektor yang memiliki pertumbuhan lebih rendah lainnya adalah Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sementara untuk Kabupaten Bengkulu Utara adalah sektor Pertambangan dan penggalian. Kemampuan kabupaten induk dalam melakukan pembangunan daerahnya tentu tidak diragukan mengingat sudah lama proses pembangunan berlangsung. Sector-sektor yang pertumbuhannya rendah adalah sector dasar yang pembangunannya memang secara rasional lebih lambat dari kabupaten-kabupaten pemekarannya yang lebih banyak pembangunannya untuk memberikan infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk pembangunan lainnya. Untuk Kabupaten Bengkulu Utara, Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh lebih rendah karena potensi tambang yang besar menjadi potensi yang kuat untuk kabupaten pemekarannya (Bengkulu Tengah).

Tabel 1 Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Induk/Kota, Tahun 2014-2017 (%)

	Lapangan Usaha/industri	Kota	BS	RL	BU	Provinsi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.20	2.35	2.42	2.56	2.13
B	Pertambangan dan Penggalian	0.40	2.21	2.06	0.04	0.53
C	Industri Pengolahan	4.15	7.18	5.35	7.48	3.32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.31	6.55	7.50	6.39	7.93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.92	0.92	2.27	2.12	1.57
F	Konstruksi	4.09	5.32	5.13	8.64	3.95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.81	8.06	7.90	8.38	5.43
H	Transportasi dan Pergudangan	5.55	6.71	6.22	6.83	1.85
I	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	9.68	9.37	9.09	9.93	6.16
J	Informasi dan Komunikasi	7.26	7.38	7.07	7.38	5.04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.26	3.38	3.93	8.28	1.89
L	Real Estate	5.09	6.78	5.34	7.91	3.34
M, N	Jasa Perusahaan	6.70	7.91	6.29	6.73	4.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.20	7.58	5.91	8.73	3.61
P	Jasa Pendidikan	5.72	6.57	5.88	7.52	3.14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.11	8.97	8.62	8.78	5.88
R, S, T, U	Jasa Lainnya	10.01	9.13	7.96	9.30	6.66
	TOTAL	5.87	5.16	5.09	4.97	3.26

Sumber: BDA 2018, BUDA, 2018, BSDA, 2018 dan RLDA, 2018, diolah.

Perubahan Struktur Ekonomi

Secara umum transformasi struktural ditandai dengan peralihan dan pergeseran kegiatan perekonomian dari sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa). Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki karakteristik umum yang hampir sama dengan kabupaten lainnya di Indonesia. Perekonomiannya masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pada tahun 2017, peranan kategori ini dalam pembentukan PDRB Bengkulu Selatan mencapai 34,26% (angka ini menurun dari 38,32% pada Tahun 2013). Menurut Sakernas 2017, lapangan usaha ini menyerap tenaga kerja sebesar 57%. Selanjutnya kategori terbesar kedua adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 15,96% (turun dari 14,61% pada Tahun 2013) disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,20% (naik dari 9,34% pada Tahun 2013). Peranan lapangan usaha lainnya berada di bawah 10%.

Selama empat tahun terakhir (2014-2017) struktur perekonomian Bengkulu Utara didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha: pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalan, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha di antaranya: pertanian, kehutanan dan perikanan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor serta sektor jasa pendidikan.

Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, di antaranya: Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rejang Lebong. Keempat sektor tersebut berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Tahun 2014 sebesar 69,04% sedangkan pada Tahun 2017 masih berkontribusi sebesar 68,36%.

Sektor Unggulan

Berdasarkan hasil perhitungan DLQ dan *Shift Share*, maka dapat diidentifikasi sektor-sektor mana saja yang menjadi unggulan kabupaten induk di Provinsi Bengkulu. Sebelum

pemekaran, dengan struktur PDRB 9 sektor ekonomi memiliki antara 4 atau 5 sektor yang diunggulkan, dan Sektor Pertanian, Sektor Bangunan dan Sektor Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan tetap menjadi unggulan semua kabupaten induk. Akan tetapi dengan perubahan struktur PDRB menjadi 17 sektor, sektor unggulan kabupaten induk menjadi lebih banyak. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Sektor Jasa Pendidikan merupakan sektor-sektor unggulan di 3 kabupaten induk, selebihnya bervariasi antar kabupaten induk untuk sektor-sektor yang juga diunggulkan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerahnya (Tabel 2). Di antara 3 kabupaten induk di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong merupakan kabupaten yang memiliki 9 sektor unggulan (terbanyak). Hal ini wajar mengingat Rejang Lebong memiliki banyak potensi ekonomi (sentra produksi berbagai komoditas), termasuk keunggulannya sebagai daerah transit yang dijadikan jalur utama distribusi barang, juga lalu lintas manusia dari berbagai daerah lain.

Tabel 2. Sektor Unggulan Sebelum Pemekaran dan Setelah Adanya Pemekaran

Sebelum Pemekaran (2000-2001)	Setelah Pemekaran (2014-2017)
Kabupaten Bengkulu Utara	
Pertanian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan
Industri Pengolahan	Konstruksi
Bangunan	Jasa Keuangan dan Asuransi
Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan	Real Estate
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	Jasa Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Selatan	
Pertanian	Pertambangan dan Penggalian
Pertambangan & Penggalian	Transportasi dan Pergudangan
Bangunan	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan	Jasa Keuangan dan Asuransi
	Real Estate
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	Jasa Pendidikan
Kabupaten Rejang Lebong	
Pertanian	Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Bangunan	Transportasi dan Pergudangan

Sebelum Pemekaran (2000-2001)	Setelah Pemekaran (2014-2017)
Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Jasa Keuangan dan Asuransi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber: Hasil Perhitungan DLQ dan SSA, 2019.

KESIMPULAN

Tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten induk di Provinsi Bengkulu sebelum dimekarkan berkisar 2,80% sampai 4,80% sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu adalah 4,15%. Setelah dilakukan pemekaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten induk berkisar antara 4,97% sampai 5,87% sementara tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu adalah 3,26%. Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, maka dengan dilakukan pemekaran wilayah tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Induk semakin kecil tetapi pemekaran daerah berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi kabupaten induk. Ada kecenderungan terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten induk sebelum dan sesudah adanya pemekaran wilayah. Sebelum terjadi pemekaran wilayah struktur perekonomian kabupaten induk cenderung didominasi oleh sektor primer. Setelah dilakukan pemekaran ada pergeseran peran sektor ekonomi dari sektor primer bergeser ke sektor sekunder dan sektor tersier, dengan sektor unggulan menjadi lebih banyak lagi.

KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Keterbatasan penelitian ini adalah dasar evaluasi pemekaran daerah hanya fokus dari sisi ekonomi sektoral sebagai dasar analisisnya. Padahal tujuan pemekaran mencakup tidak saja mencakup sisi ekonomi, tetapi banyak aspek lainnya. Sekalipun kesejahteraan tetap menjadi prioritas melalui akses pembangunan dan pemerataan hasilnya. Oleh karena itu, penelitian yang dapat dilakukan ke depannya adalah evaluasi yang komprehensif dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dari hasil evaluasi pemekaran pada kabupaten induk, maka perlu penguatan infrastruktur yang dapat memperkuat daya saing sector–sektor sekunder dan tersier, karena sektor ini

sensitif terhadap perubahan-perubahan ekonomi global sehingga inovasi teknologi dan penguatan SDM perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, M. Yoga. (2019). *Dampak Pembangunan Regional di Indonesia*. Diperoleh dari www.kompasiana.com.
- Arsyad, Lincolin. (2016). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Ed. Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Ed.2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dewi, Ni M.W.S., & I Nyoman, M.Y. (2017). Analisis Sektor Potensial Dalam Menetapkan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal EP Unud*, 7(1): 152-183. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep>.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rajab, Untung S, Ignatia Martha, Wasiaturrahma., & Ardi, Hamzah. (2011). *Integrasi, Sinergi dan Terobosan Pembangunan Daerah*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Sun'an, M., & Abdurrahman, S. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Syaukani, G. A., & Rasyid, M. R. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Gunanto, K. (2015). Analisa LQ, DLQ, LC dan Komparatif Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Diperoleh dari www.kompasiana.com
- Handoko, Budiono S., 2001, Pemikiran Pendekatan Pembangunan di Awal Millennium: Penekanan pada Kualitas Pertumbuhan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 6(2), 123-132.
- Micariandy, FK. (2019). Peran Analisis LQ dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. Diperoleh dari www.kompasiana.com.
- Nazipawati. (2007). Aplikasi Model Static dan Dynamic Location Quotients dan Shift Share dalam Perencanaan Ekonomi Regional. *Eko-Regional*, 2(2), 82. Diperoleh dari <https://media.neliti.com>
- Bappenas. (2007). *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*. Diperoleh dari www.bappenas.go.id
- BPS. (2018). *Bengkulu Dalam Angka*. Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Diperoleh dari www.bengkulu.bps.go.id
- BPS. (2018). *Bengkulu Selatan Dalam Angka*. Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Diperoleh dari www.bengkulu.bps.go.id
- BPS. (2018). *Bengkulu Utara Dalam Angka*. Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Diperoleh dari www.bengkulu.bps.go.id
- BPS. (2018). *Rejang Lebong Dalam Angka*. Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Diperoleh dari www.bengkulu.bps.go.id

BPS. (2017). *Sakernas*. Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Diperoleh dari www.bengkulu.bps.go.id

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.